



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : JUJU MASUNAH
- Jabatan** : KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI
- NHK** : 190937

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **590.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 1430 m2/157 m2 di MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/100 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/70 m2 di MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **204.000.000**

- MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- MOBIL, TOYOTA AGYA/1.2GSTDA/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
- MOTOR, HONDA EIF02N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **48.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **371.314.747**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **---**

Sub Total **Rp.** **1.213.314.747**

III. HUTANG **Rp.** **70.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.143.314.747**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.